

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasar keuangan Indonesia mengalami pemulihan yang mencengangkan dari kondisi krismon pada akhir tahun 1990-an. Kebijakan fiskal yang bijaksana dan fundamental ekonomi yang makin kuat berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sejak tengah tahun 2000-an (meskipun pertumbuhan ekonomi global yang lambat dan harga komoditas yang rendah menyebabkan sebuah *slowdown* di perekonomian Indonesia pada tahun 2015-2018). Mengawali tahun 2019, Indonesia harus mampu membangun optimisme untuk menghadapi setiap situasi ekonomi, baik global maupun domestik. Namun, kondisi ini harus tetap diwaspadai karena mengingat kondisi ekonomi global yang lebih rentan dengan krisis karena mudah berubah-ubah. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan APBN 2019 dengan lebih baik, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Lebih lanjut, pemerintah juga berharap APBN yang lebih baik dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, sehingga kinerja perekonomian Indonesia 2019 menjadi lebih baik dari 2015.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Trend penerimaan negara sejauh ini positif karena tambahan dari uang tebusan kebijakan repatriasi dan deklarasi pajak. Diharapkan dengan naiknya trend pajak dibanding dengan tahun lalu, penerimaan negara menjadi lebih baik. Walaupun belum mencapai APBN tetapi dari perbandingan penerimaan tahun 2018, penerimaan tahun 2019 lebih baik. Berikut tabel penerimaan negara tahun 2015 sampai tahun 2019.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (dalam milyar rupiah)**  
**Tahun 2015-2019**

No	Sumber Penerimaan	2015	2019
1.	Penerimaan Dalam Negeri:	1.758.330,90	1.846.075,50
	Penerimaan Perpajakan	1.489.255,50	1.565.784,10
	Penerimaan Bukan Pajak	269.075,40	280.291,40
2.	Hibah	3.311,90	2.031,80
	<b>Jumlah</b>	<b>1.761.642,80</b>	<b>1.848.107,20</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Dilihat dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan negara tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara tahun 2015.

Dimana sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta hibah. Penerimaan perpajakan lebih besar dalam penerimaan negara dibandingkan penerimaan bukan pajak dan hibah. pemerintah mengambil tindakan untuk meniadakan pemotongan anggaran lebih lanjut.

Penerimaan negara di Indonesia dapat dikatakan sudah mulai membaik. Hal ini juga berpengaruh kepada keuangan seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya pada Provinsi Sumatera Barat. Keuangan Sumbar 2019 mengalami kesulitan karena adanya penundaan DAU oleh pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim setelah rapat paripurna pengesahan KUPA PPAS dalam artikel yang berjudul Penundaan DAU Sulitkan Keuangan Sumbar (<http://sumbarprov.go.id>). Keuangan daerah sangat bergantung kepada DAU dan DAK. Sehingga, penundaan DAU dan pemangkasan DAK tahun ini akan berdampak cukup besar dan menyulitkan keuangan daerah. Meski demikian, Pemprov dan Dewan Perwakilan Rakyat tetap mengebut pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2019 dan berharap sudah bisa dibelanjakan pada awal Oktober mendatang. Dengan adanya kebijakan penundaan DAU tersebut, diharapkan pemerintah kota setempat mengefisiensikan sumber pendapatan dan mengoptimalkan kinerjanya dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun 2019.

Dengan semakin mantapnya undang-undang otonomi daerah di seluruh Indonesia, khususnya untuk Sumatera Barat, Pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan sebagai penyelenggara Pemerintah terendah sudah berjalan

dengan baik. Salah satu daerah di Sumatera Barat yaitu Kota Sawahlunto menunjukkan realisasi pendapatan dan pengeluaran daerah yang mulai membaik. Sampai akhir tahun 2015 dimana untuk Kota Sawahlunto terbentuk atas 4 Kecamatan 10 Kelurahan dan 27 Desa. Sumber: DPPKAD Kota Sawahlunto.

Fenomena yang biasa terjadi pada Pemerintah Daerah yaitu masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan. Sehingga diperlukan peranan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kekurangan tersebut. Salah satunya dengan cara menambah pendapatan daerah agar dapat memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan dana belanja modal sesuai target yang ingin dicapai.

Terkait terobosan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah, Walikota Kota Sawahlunto terus melakukan kajian terkait strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pada kas daerah. Strategi tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan untuk objek wisata yang ada di Sawahlunto. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan survey awal terhadap potensi objek-objek wisata yang mungkin dikembangkan serta memaksimalkan potensi destinasi yang sudah banyak dikunjungi agar lebih menarik bagi para pelancong.

Kota Sawahlunto memiliki banyak bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian bangunan telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai cagar budaya dan objek wisata seperti Museum Gudang Ransum dan Museum Kereta Api Sawahlunto yang dahulunya digunakan sebagai dapur umum dan

stasiun kereta api sebagai tempat dilakukannya aktivitas pengangkutan batu bara dijadikan museum pada tahun 2005, objek wisata keluarga seperti Waterboom dan Resort Wisata Kandi. Objek wisata unggulan yang ada di kota ini adalah Lubang Suro yang berasal dari nama seorang mandor pekerja paksa *Mbah Suro*, di mana pengunjung dapat melakukan napak tilas pada areal bekas penambangan.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja membutuhkan tersedianya dana yang besar untuk membiayai kegiatan tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadimeningkat. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahandaerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan(kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut data penerimaan daerah dalam APBD Kota Sawahlunto:

**Tabel 1.2**

**Realisasi Penerimaan Daerah dalam APBD Kota Sawahlunto  
(dalam ribuan rupiah)  
Tahun 2017-2018**

Uraian (juta Rp)	TAHUN	
	2017	2018
Pendapatan Transfer	255.712.964	256.955.865,96
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.921.827	32.635.818,95
<b>Total Pendapatan</b>	293.227.229	313.378.773,34

Sumber: DPPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan daerah Kota Sawahlunto lebih banyak dipengaruhi oleh pendapatan transfer, tahun 2017 pendapatan transfer sebesar Rp.255.712.964 dan meningkat tahun 2018 menjadi Rp.256.955.866. Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk pendapatan transfer lebih mendominasi dalam susunan APBD.

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam hal ini PAD, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah. Akan tetapi, penggalan sumber pajak dan retribusi daerah tersebut masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Dana transfer dari Pemerintah Pusat masih belum digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang masih belum maksimal. Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi pendapatan daerah

pemerintahan Sawahlunto dengan sumber dana dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Fitria Megawati Sularo (2013) yang meneliti pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memperoleh hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Meskipun demikian penelitian di Indonesia mengenai Anggaran Modal, khususnya mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal masih sedikit dilakukan hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari keterlambatan pekerjaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto melonjak dan jauh dari target yang telah ditetapkan.
2. Masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana belanja modal.
3. Relatif kecilnya peranan(kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) di bidang keuangan daerah.
4. Minimnya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam kualitas layanan publik.

5. Masih dirasakannya kurangnya kontribusi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.
6. Adanya dana transfer dari Pemerintah Pusat belum digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah.
8. Total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.
9. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat belum dimanfaatkan sepenuhnya.
10. Pemberian layanan birokrasi seperti pelayanan pajak dan lainnya kepada masyarakat yang masih belum maksimal.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka masalah dibatasi pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal pada Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi anggaran belanja modal di Kota Sawahlunto tahun (2015-2019)?

2. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi anggaran belanja modal di Kota Sawahlunto tahun (2015-2019)?
3. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi anggaran belanja modal di Kota Sawahlunto tahun (2015-2019)?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap alokasi anggaran belanja modal di Kota Sawahlunto tahun (2015-2019).
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap alokasi anggaran belanja modal di Kota Sawahlunto tahun (2015-2019).
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap alokasi anggaran belanja modal di Kota Sawahlunto tahun (2015-2019).

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah daerah kota Sawahlunto  
Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan

datang khususnya mengenai komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kota di Sawahlunto. Diharapkan pemerintah daerah tidak menggantungkan diri kepada pemerintah pusat terus-menerus paling tidak dapat diminimalisirkan sehingga semakin mandiri.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana pengaruh PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini juga bermanfaat untuk peneliti yang menggunakan topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam menambah penelitian akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu, khususnya dibidang akuntansi.